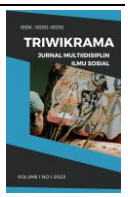
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN AMAN TERPADU DI KAWASAN WISATA BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TINGKAT PREMANISME

Paraswati[1], Rahma Diana Oktavia Ningsih[2], Annisa Euis Andhini[3], Gerin Lady Sanofa[4], Galuh Efnol Adzan[5]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
07011282328120@student.unsri.ac.id[1],
07011282328115@student.unsri.ac.id[2],
07011282328132@student.unsri.ac.id[3],
07011282328144@student.unsri.ac.id[4],
galuhefnoladzan@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Premanisme merupakan permasalahan sosial yang berdampak pada rasa aman dan kualitas ruang publik, khususnya di kawasan wisata perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi empiris premanisme di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang serta merumuskan alternatif kebijakan penanggulangannya melalui pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparat Satpol PP, pedagang, dan pengunjung, serta studi literatur dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik premanisme di BKB masih terjadi secara sistematis, terutama pada malam hari, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan penerangan, serta tekanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan, yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, mediasi komunitas dan sanksi sosial, serta penataan dan pemeliharaan lingkungan aman terpadu. Berdasarkan analisis kriteria Patton dan Sawicki, program penataan dan pemeliharaan lingkungan aman terpadu dinilai sebagai alternatif paling layak untuk diterapkan sebagai prioritas awal karena efektif meningkatkan rasa aman secara cepat dan terukur.

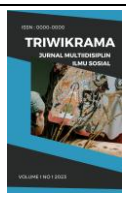
Kata Kunci: Premanisme; Kebijakan Publik; Ruang Publik; Kawasan Wisata; Keamanan

Abstract

Premanism is a social problem that affects public safety and the quality of public spaces, particularly in urban tourism areas. This study aims to analyze the empirical conditions of premanism in the Benteng Kuto Besak (BKB) tourism area in Palembang and to formulate policy alternatives for its mitigation using a public policy approach. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews with municipal police officers, traders, and visitors, as well as literature and policy document reviews. The findings indicate that premanism in the BKB area persists systematically, especially at night, driven by weak supervision, inadequate lighting, and socio-economic pressures on the surrounding community. Three policy alternatives are proposed: community-based economic empowerment, community mediation and social sanctions, and an integrated safe environment arrangement and maintenance program. Based on the evaluation using Patton and Sawicki's criteria, the integrated safe environment program is identified as the most feasible initial policy due to its effectiveness in rapidly improving public safety.

Keywords: *Premanism; Public Policy; Public Space; Tourism Area; Human Security*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Premanisme merupakan fenomena sosial yang telah lama melekat dalam dinamika masyarakat Indonesia. Secara historis, istilah preman berasal dari kata freeman yang pada awalnya memiliki makna positif sebagai "orang bebas", namun dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi perilaku menyimpang yang identik dengan kekerasan, intimidasi, pemerasan, dan gangguan ketertiban umum (Banjar, 2008 dalam Hidayah & Sebyar, 2023). Premanisme berkembang sebagai bagian dari ideologi kekerasan yang memosisikan keberanian dan ancaman sebagai alat mencapai tujuan tertentu (Kemenag, 2023). Fenomena ini juga berakar pada faktor sosial-ekonomi, terutama kemiskinan, yang mendorong sebagian masyarakat memilih aktivitas ilegal sebagai sumber penghasilan (Imam, 2023).

Dalam lingkup global, *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* 1994 menekankan konsep keamanan manusia (*human security*), yaitu keamanan yang berorientasi pada perlindungan manusia dari ancaman sosial-ekonomi, bukan sekadar keamanan teritorial negara (UNDP, 1994). Premanisme, yang mengancam rasa aman dan stabilitas sosial, menjadi hambatan terhadap pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), kota berkelanjutan (SDG 11), serta perdamaian dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Oleh karena itu, premanisme pada hakikatnya merupakan isu pembangunan dan keamanan manusia.

Pada level nasional, premanisme terus muncul sebagai persoalan berulang yang menimbulkan keresahan publik. Data Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas) Bareskrim Polri yang dikutip dari Kompas mencatat bahwa hingga April 2025 terdapat 1.426 kasus premanisme, dengan rata-rata 12 kasus per hari, sementara operasi serentak pada Mei 2025 menindak 3.326 kasus dan mengamankan lebih dari 13.000 pelaku (Krisdamarjati, 2025; Naibaho, 2025). Penyebaran kasus tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga di luar Jawa, menunjukkan bahwa premanisme merupakan masalah nasional yang kompleks dan multidimensi. Faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum saling berkelindan dalam menjaga keberlangsungan praktik-praktik tersebut.

Dalam konteks lokal, Kota Palembang menjadi contoh nyata bagaimana premanisme dapat mengganggu keamanan dan menurunkan kualitas ruang publik, khususnya di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Kawasan ini merupakan ikon pariwisata kota yang ramai dikunjungi, namun praktik pemalakan, pungutan liar terhadap pedagang, dan intimidasi terhadap pengunjung masih ditemukan. Operasi penertiban seperti Operasi Sikat Musi I telah dilakukan, namun sifatnya temporer dan belum menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi masyarakat sekitar (Tribratanews Polrestabes Palembang, 2025). Meskipun tingkat kemiskinan kota menurun menjadi 9,04% atau sekitar 162,31 ribu jiwa, besarnya jumlah penduduk miskin tetap menjadi faktor kerentanan sosial yang memicu munculnya aktivitas premanisme (Silitonga, 2025).

Regulasi seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan belum mengatur secara spesifik mekanisme penanggulangan premanisme di ruang publik wisata. Kebijakan yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan tata kelola ruang publik yang seharusnya aman, inklusif, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana digarisbawahi dalam konsep ruang publik ideal (Purwanto, 2014; Oldenburg, 1999 dalam Almadina & Widyastuti, 2023).

Temuan lapangan melalui wawancara dengan Satpol PP, pedagang, dan pengunjung mengonfirmasi bahwa praktik premanisme di BKB masih terjadi, terutama pada malam hari ketika pengawasan lemah. Pelaku umumnya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu, dan sebagian merupakan pelaku berulang. Pedagang mengakui adanya pembayaran "uang lapak" harian kepada pihak tertentu dan enggan melapor karena minimnya kepercayaan kepada aparat, bahkan berdasarkan pengalaman masa lalu ketika aparat dianggap turut terlibat dalam

pungutan tersebut. Pengunjung juga melaporkan pengalaman dimintai uang secara paksa atau menyaksikan tindakan pemalakan secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat akan ruang publik aman dengan kondisi faktual di lapangan.

Dari sisi akademis, berbagai penelitian sebelumnya cenderung melihat premanisme dari perspektif hukum, kriminologi, sosial, atau budaya. Misalnya, penelitian "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasa" oleh Kusuma & Rochmani (2023) dan penelitian "Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas" oleh Manda dkk. (2023), menekankan aspek yuridis dan penegakan hukum, sementara penelitian "Tinjauan Kriminologis terhadap Aksi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang" oleh Herman dkk. (2024) dan penelitian "Premanisme di Kalabahi, Alor" oleh Gunawan (2021) menyoroti relasi sosial, kemiskinan, dan struktur ekonomi informal sebagai penyebab premanisme. Kajian yang secara eksplisit membahas premanisme sebagai persoalan kebijakan publik, terutama dalam konteks tata kelola ruang publik wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, masih sangat terbatas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi, yaitu perlunya pendekatan analisis kebijakan publik dalam memahami dan merumuskan solusi terhadap premanisme di kawasan wisata perkotaan. Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan aspek keamanan manusia, tata kelola ruang publik, dan pemberdayaan sosial-ekonomi dalam merancang kebijakan penataan kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, preventif, dan berkelanjutan dalam menciptakan kawasan wisata yang aman, inklusif, dan mendukung pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Tujuan penelitian ini ialah merancang strategi kebijakan yang efisien dan terukur untuk menanggulangi serta mencegah praktik premanisme di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang. Sasaran utama penelitian ini adalah menciptakan kawasan wisata yang aman, tertib, dan inklusif melalui pendekatan terpadu yang memadukan dimensi keamanan, sosial, dan ekonomi. Fokus penelitian diarahkan pada kawasan BKB sebagai ikon budaya dan perekonomian Kota Palembang yang menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena premanisme di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77 dalam Fadli, 2021).

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP yang menangani pengamanan BKB, serta survei terbuka kepada pengunjung dan pedagang wisata BKB. Sedangkan data sekunder meliputi studi literatur, dokumen kebijakan, dan laporan terkait premanisme sebagai bahan pelengkap.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Ibrahim, 2018).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PEMBAHASAN

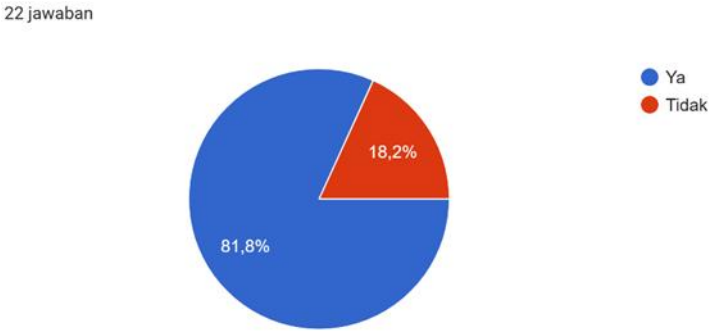
Kondisi Empris Premanisme di Kawasan Wisata BKB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa premanisme di kawasan Benteng Kuto Besak tidak hanya berupa tindak pemalakan yang bersifat sesekali, melainkan sudah berlangsung secara sistematis terutama pada malam hari. Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP, praktik pemalakan lebih sering terjadi ketika kondisi penerangan kurang memadai, pengunjung ramai, dan aparat mengalami keterbatasan kapasitas pengawasan. Pola ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara lemahnya tata kelola ruang publik dan meningkatnya peluang kejahatan.

Selain itu, wawancara dengan pedagang mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar pedagang pernah mengalami pungutan liar, terutama oleh pihak yang mereka sebut “pemilik lahan”. Meskipun intensitas pemalakan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, praktik tersebut masih dianggap sebagai hal “wajar” menandakan terjadinya normalisasi perilaku premanisme akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap pedagang kecil. Pelaku umumnya berasal dari masyarakat sekitar yang sedang berada dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga premanisme dijadikan sumber pendapatan instan.

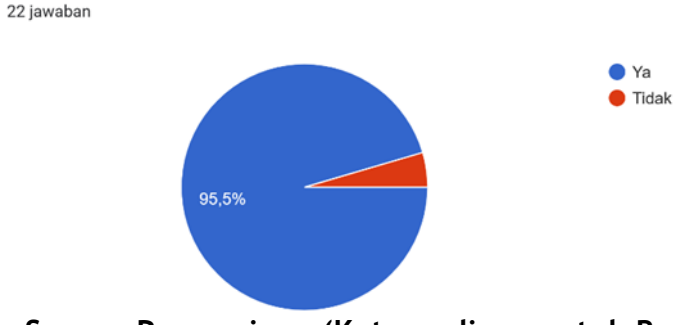
Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadaa dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa pedagang di pasar rentan mengalami pungutan liar karena kurangnya perlindungan hukum dan ketergantungan pada pihak-pihak informal yang mengklaim sebagai “pengelola lapak”. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan di ruang publik yang tidak terkelola dengan baik.

Data survei terhadap pengunjung menguatkan kesimpulan bahwa rasa aman di BKB masih belum optimal.



Gambar 1. Diagram Survei Pengunjung (Rasa Aman)

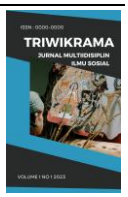
Sebagian besar responden mengaku pernah menjadi korban atau menyaksikan pemalakan secara langsung. Pengunjung juga menyatakan bahwa sikap pengamen yang memaksa dan mudah marah ketika tidak diberi uang menjadi faktor psikologis yang mengganggu kenyamanan berwisata. Meski demikian, mayoritas pengunjung menyatakan akan tetap datang kembali apabila pengamanan ditingkatkan.



Gambar 2. Diagram Survey Pengunjung (Ketersediaan untuk Berkunjung Kembali)

Hal ini menunjukkan bahwa kawasan BKB memiliki nilai rekreasi yang tinggi, namun sangat membutuhkan intervensi kebijakan yang serius.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Temuan ini juga memperkuat teori *Human Security* dari UNDP (1994), yang menyatakan bahwa keamanan adalah syarat dasar bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat merasa takut bahkan sekadar berjalan atau duduk di ruang publik, maka ruang tersebut gagal memenuhi fungsinya sebagai ruang interaksi sosial yang inklusif.

Interpretasi Temuan Berdasarkan Teori dan Studi Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat dengan teori ruang publik Oldenburg (1999), yang menekankan bahwa ruang publik harus bebas dari rasa takut, memiliki akses terbuka, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Di BKB, kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena masih adanya intimidasi, pengamen agresif, serta pemalakan.

Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan minimnya keterampilan menjadi penyebab utama premanisme sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Herman dkk. (2024) serta Gunawan (2021). Dalam konteks BKB, kondisi ini diperkuat oleh data BPS Kota Palembang tahun 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih mencapai 9,04% atau 162,31 ribu jiwa. Dengan tekanan ekonomi seperti ini, aktivitas ilegal menjadi jalur cepat bagi kelompok rentan untuk mendapatkan penghasilan.

Selanjutnya, analisis terhadap budaya premanisme juga terlihat pada adanya hubungan patron-klien antara pelaku premanisme dengan pedagang. Beberapa pedagang merasa bahwa memberikan “uang keamanan” merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Fenomena ini dijelaskan oleh Gunawan (2021) bahwa dalam beberapa konteks sosial, preman bukan hanya pelaku kriminal, namun bagian dari struktur sosial informal yang memberikan rasa aman semu kepada pedagang, meskipun dengan biaya yang merugikan. Oleh karena itu, menekan premanisme tidak cukup hanya dengan tindakan represif, tetapi juga harus mempertimbangkan perbaikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat sekitar BKB.

Analisis Alternatif Kebijakan

Penelitian ini menyusun tiga alternatif kebijakan berdasarkan metode survei cepat dan literatur kebijakan publik. Ketiga alternatif tersebut dievaluasi menggunakan kerangka evaluasi Patton & Sawicki (1993), meliputi efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif.

1) Program Pemberdayaan Ekonomi dan Keterampilan Berbasis Komunitas

   Alternatif ini menargetkan akar masalah yaitu kemiskinan dan pengangguran. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, penguatan UMKM lokal, serta pembentukan kelompok usaha masyarakat sekitar BKB. Program ini dinilai memiliki potensi besar untuk menurunkan premanisme dalam jangka panjang. Namun, program ini membutuhkan waktu untuk menghasilkan perubahan signifikan serta memerlukan komitmen anggaran dan koordinasi yang kuat. Dalam jangka pendek, program ini belum mampu memberikan jaminan penurunan praktik pemalakan secara cepat.

2) Program Mediasi Komunitas dan Sanksi Sosial Berbasis Deterensi

   Alternatif kedua menitikberatkan pada pendekatan restoratif-hukum melalui mediasi komunitas, dialog masalah keamanan, dan pemberian sanksi sosial bagi pelaku yang berulang seperti teguran publik, larangan akses area wisata, atau kerja sosial. Pendekatan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sebelum pelaku masuk ke jalur hukum. Kelemahan alternatif ini adalah rendahnya efektivitas jika norma sosial masyarakat tidak mendukung perubahan perilaku, serta memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dan berpotensi memunculkan pelabelan sosial negatif.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3) Program Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Aman Terpadu

Berdasarkan analisis, ini adalah alternatif paling unggul karena memberikan dampak cepat dan nyata terhadap pengurangan peluang terjadinya premanisme. Program ini mencakup peningkatan penerangan di seluruh kawasan BKB, pemasangan CCTV berteknologi tinggi di titik rawan, patroli terpadu oleh Satpol PP, Polri, dan komunitas masyarakat, kemudian penataan lapak pedagang agar tertib dan tidak menjadi ruang abu-abu bagi preman, pembentukan kelompok penjaga lingkungan berbasis masyarakat, dan pemasangan CCTV terbukti efektif menurut penelitian Saputra (2024) karena meningkatkan deteksi, mempercepat respons aparat, dan menurunkan ruang gerak pelaku.

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Kebijakan Penanggulangan Premanisme di Kawasan Wisata BKB Palembang

Alternatif Kebijkan	Fokus Kebijakan	Kelebihan	Kelemahan
Program Pemberdayaan Ekonomi dan Keterampilan Berbasis Komunitas.	Pelatihan kerja, bantuan modal, integrasi ke sektor ekonomi pariwisata.	Menyasar akar masalah kemiskinan dan pengangguran; berpotensi berkelanjutan; mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal.	Membutuhkan waktu lama; memerlukan koordinasi lintas instansi dan komitmen anggaran.
Program Mediasi Komunitas dan Sanksi Sosial Berbasis Deterensi.	Mediasi komunitas, sanksi sosial, penindakan ringan.	Memberikan efek jera awal; meningkatkan norma sosial ketertiban; biaya relatif rendah.	Efek temporer bila tidak diiringi pemberdayaan; legitimasi aparat beragam.
Program Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Aman Terpadu.	CCTV, penerangan, patroli terpadu, desain ruang publik aman.	Meningkatkan rasa aman secara langsung; mencegah kejahatan melalui pengawasan alami.	Tidak menyentuh faktor sosial ekonomi; berpotensi memindahkan masalah ke lokasi lain.

Penilaian terhadap ketiga alternatif kebijakan dilakukan menggunakan skala 1–4, dengan kriteria Skala 1 = Rendah, Skala 2 = Sedang, Skala 3 = Tinggi, dan Skala 4 = Sangat Tinggi. Penilaian didasarkan pada lima indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif, yang umum digunakan dalam analisis kebijakan publik. Efektivitas dimaknai sebagai kemampuan kebijakan dalam menurunkan tingkat premanisme secara langsung maupun struktural. Efisiensi merujuk pada perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan. Ekuitas menilai tingkat keadilan distribusi dampak kebijakan bagi berbagai kelompok masyarakat. Kelayakan politik mencerminkan tingkat dukungan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan agenda pemerintah, sementara

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

kelayakan administratif berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan kapasitas implementasi. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelayakan relatif yang lebih besar pada setiap dimensi.

Tabel 2.Penilaian Alternatif Kebijakan Penanggulangan Premanisme di Kawasan BKB

Kriteria (Patton & Sawicki (1993))	Alternatif Kebijakan		
	Program Pemberdayaan Ekonomi dan Keterampilan Berbasis Komunitas (Pendekatan Sosial-Ekonomi)	Program Mediasi Komunitas dan Sanksi Sosial Berbasis Deterensi (Pendekatan Restoratif-Hukum)	Program Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Aman Terpadu (Pendekatan Infrastruktur Sosial)
Efektivitas	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)	4 (Sangat Tinggi)
Efisiensi	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)
Ekuitas	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)
Kelayakan Politik	3 (Tinggi)	3 (Tinggi)	4 (Sangat Tinggi)
Kelayakan Administratif	2 (Sedang)	3 (Tinggi)	4 (Sangat Tinggi)
Jumlah Nilai	**14**	**15**	**17**

Di antara tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, Program Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Aman Terpadu menunjukkan Tingkat kelayakan tertinggi untuk diterapkan sebagai prioritas awal. Program ini dinilai berpotensi menghasilkan dampak relative cepat karena menyasar titik strategis dalam praktik premanisme, yaitu kondisi ruang publik dan lemahnya pengawasan. Peningkatan penerangan, pemasangan CCTV, penertiban pedagang, serta patroli terpadu diperkirakan dapat mengurangi "ruang abu-abu" yang selama ini digunakan pelaku untuk melakukan pemalakan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), yang menekankan bahwa desain ruang yang baik dan tepat dapat menurunkan peluang terjadinya kejahatan.

Meskipun demikian, penataan lingkungan belum cukup untuk menjamin keberlanjutan penurunan premanisme tanpa disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja tetap menjadi pendorong utama munculnya pelaku baru. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi dan mediasi komunitas perlu menjadi bagian dari tahapan lanjutan setelah kondisi keamanan dasar tercipta. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ilegal dan pada saat yang sama membangun norma kolektif yang menolak tindakan premanisme.

Dengan demikian, Program Penataan Lingkungan menjadi langkah prioritas untuk menciptakan keamanan jangka pendek, sementara pemberdayaan ekonomi dan mediasi komunitas memperkuat perubahan perilaku dalam jangka Panjang. Sinergi kebijakan ini tidak hanya menekan gejala premanisme, tetapi juga berkontribusi pada penanganan faktor penyebabnya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya kota dan permukiman yang aman (SDGs 11) serta masyarakat yang damai dan inklusif (SDGs 16).

Pendekatan terpadu ini memberi dasar kuat bagi pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan BKB sebagai kawasan wisata yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pengunjung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa premanisme di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang masih berlangsung secara sistematis dan berdampak negatif terhadap rasa aman pengunjung serta keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang. Praktik pemalakan, pungutan liar, dan intimidasi terutama terjadi pada malam hari, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan penerangan, serta tekanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya tata kelola ruang publik yang aman dan inklusif.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan kriteria Patton dan Sawicki, program penataan dan pemeliharaan lingkungan aman terpadu dinilai sebagai alternatif paling layak untuk diterapkan sebagai prioritas awal. Kebijakan ini efektif meningkatkan rasa aman secara cepat melalui peningkatan penerangan, pemasangan CCTV, patroli terpadu, dan penataan pedagang. Meskipun demikian, upaya penanggulangan premanisme secara berkelanjutan memerlukan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi dan mediasi komunitas guna menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan terpadu menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan wisata BKB yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Almadina, A. F., & Widyastuti, D. T. (2023). Pengaturan Fisik Pada Ruang Publik Sebagai Pencegah Terjadinya Perilaku Negatif. *NALARs*, *23*(1), 59-68. https://doi.org/10.24853/nalars.23.1.59-68

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33-54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Gunawan, R. Premanisme di Kalabahi, Alor. *Lembaran Antropologi*, *2*(1), 53-67. https://doi.org/10.22146/la.4265

Herman, Y. N., Pello, J., & Kian, D. (2024). Tinjauan Kriminologis terhadap Aksi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 232–249. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3911

Hidayah, M. R., & Sebyar, M. H. (2023). Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945: Studi Kasus Peran Warga dalam Meminimalisir Premanisme di Kecamatan Jayamukti. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, *1*(4), 68–86. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1444

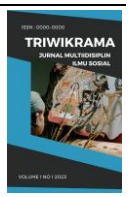
Ibrahim, M. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Imam, I. (2023). Sebab Masalah Sosial Premanisme Berkembang di Indonesia. *Fakultas Psikologi Terbaik Di Sumatera Utara*. https://psikologi.uma.ac.id/sebab-masalah-sosial-premanisme-berkembang-di-indonesia/

Kemenag. (2023). *Premanisme, Kebudayaan, dan Ideologi Kekerasan*. https://kemenag.go.id/opini/premanisme-kebudayaan-dan-ideologi-kekerasan-02m9Q

Krisdamarjati, Y. A. (2025). *Sentimen Warganet terhadap Aksi Premanisme dan Organisasi Masyarakat yang Meresahkan*. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/sentimen-warganet-terhadap-aksi-premanisme-dan-organisasi-masyarakat-yang-meresahkan

Kusuma, G. P., & Rochmani, R. (2023). Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan. *Unes Journal of Swara Justisia, 7*(3), 954-967. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.422



Manda, R. P., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2023). Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 408-418. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.162

Nadaa, F. T., Nanang, M., & Rahman, A. (2023). Dampak dari Sikap Premanisme terhadap Pedagang Pasar Segiri Kota Samarinda. *eJournal Pembangunan Sosial*, *11*(3), 149-159. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1710

Naibaho, R. (2025). *Kapolri: 13 Ribu Pelaku Premanisme Ditangkap, 67 Persen Masyarakat Puas*. detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7990102/kapolri-13-ribu-pelaku-premanisme-ditangkap-67-persen-masyarakat-puas

Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, *16*(3), 153–167. https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167

Saputra, A. (2024). Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023. *Jurnal Litbang Polri*, *27*(1), 44-54. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.238

Silitonga, L. (2025). *BPS Catat Kemiskinan Palembang Turun Jadi 9,04 Persen*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. https://rri.co.id/daerah/1826581/bps-catat-kemiskinan-palembang-turun-jadi-9-04-persen

Tribratanews Polrestabes Palembang. (2025). *Satgas Preventif Operasi Sikat Musi I 2025 Tangkap Pelaku Premanisme di Palembang, Tegaskan Komitmen Ciptakan Kota Aman*. https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/8006/Satgas-Preventif-Operasi-Sikat-Musi-I-2025-Tangkap-Pelaku-Premanisme-di-Palembang--Tegaskan-Komitmen-Ciptakan-Kota-Aman

United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. Dalam *Human Development Reports*. United Nations. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994